



SEJARAH DINASTI MUGHAL: PERPADUAN BUDAYA ISLAM DAN HINDU DI INDIA

HISTORY OF THE MUGHAL DYNASTY: THE FUSION OF ISLAMIC AND HINDU CULTURE IN INDIA

Aisyah Zahratunnisa¹, Danang Syaifulloh², Fajar³, Ahmad Maftuh Sujana⁴

Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: aisyahzahratunnisa@gmail.com¹, d.syaifullah12@gmail.com², fajaralbelethi@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 08-05-2025

Revised : 10-05-2025

Accepted : 12-05-2025

Published : 14-05-2025

Abstract

The Mughal Dynasty was one of the largest empires in Indian history, lasting from the 16th to the 19th century. It was founded by Babur in 1526 after his victory at the Battle of Panipat. During its golden age, the Mughal Dynasty was not only known for its territorial expansion and strong administration but also for its success in uniting elements of Islamic and Hindu culture in India. Through tolerance policies introduced by emperors like Akbar, the Mughals created social harmony that allowed the flourishing of art, architecture, and an inclusive governance system. This cultural fusion was reflected in various aspects of life, including the architecture of the Taj Mahal and the Red Fort, as well as in the legal and administrative systems that accommodated diverse social groups. However, the weakening of leadership and increasing pressure from colonial forces led to the fall of the dynasty in the 19th century. This article explores the history of the Mughal Dynasty, focusing on its role in shaping a cultural synthesis that had a lasting impact on Indian history.

Keywords: *Mughal Dynasty, Islam, Hinduism, tolerance, culture, India*

Abstrak

Dinasti Mughal merupakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah India, yang bertahan dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Babur pada tahun 1526 setelah kemenangannya dalam Pertempuran Panipat. Selama masa keemasannya, Dinasti Mughal tidak hanya dikenal karena perluasan wilayah dan administrasi yang kuat, tetapi juga karena keberhasilannya dalam menyatukan unsur-unsur budaya Islam dan Hindu di India. Melalui kebijakan toleransi yang diperkenalkan oleh kaisar seperti Akbar, Mughal menciptakan harmoni sosial yang memungkinkan berkembangnya seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang inklusif. Perpaduan budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk arsitektur Taj Mahal dan Benteng Merah, serta dalam sistem hukum dan administrasi yang mengakomodasi berbagai kelompok sosial. Namun, melemahnya kepemimpinan dan meningkatnya tekanan dari kekuatan kolonial menyebabkan jatuhnya dinasti tersebut pada abad ke-19. Artikel ini membahas sejarah Dinasti Mughal, dengan fokus pada perannya dalam membentuk sintesis budaya yang berdampak abadi pada sejarah India.

Kata kunci: *Dinasti Mughal, Islam, Hinduisme, toleransi, budaya, India*



PENDAHULUAN

Dinasti Mughal adalah sebuah kekaisaran Islam sangat banyak dan berperan yang pernah berdiri di Asia Selatan, khususnya di India. Diciptakan oleh Babur dalam permulaan tahun ke-16, kekuasaan dinasti ini berlangsung lebih dari beberapa tahun dan memperoleh masa keemasannya di bawah kepemimpinan beberapa prajurit seperti Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Pada masa pemerintahan mereka, India mengalami perkembangan pesat di beragam aspek, seperti arsitektur, seni, sastra, serta sistem pengelolaan pemerintahan.

Walaupun beberapa penduduk India beragama Hindu, dinasti Mughal berhasil menciptakan kerukunan antaragama melalui kewenangan penghormatan dan keterbukaan, terutama pada masa Akbar yang memperkenalkan konsep “Din-i Ilahi” sebagai upaya menyatukan berbagai kepercayaan. Peran peradaban Mughal bukan hanya dalam bidang politik, namun membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan, yang jejaknya sering dapat dirasakan sampai sekarang (Darmawan Dkk, 2024).

Dinasti Mughal mempunyai khas tersendiri, terutama dalam bidang seni, arsitektur megah, serta berbagai bangunan bersejarah, termasuk masjid. Salah satu aspek menarik dari dinasti ini adalah keberagaman agama yang diikuti oleh penduduknya, yaitu Hindu dan Islam. Walaupun ketidaksamaan keyakinan terkadang memicu perbedaan pendapat, Dinasti Mughal akhirnya mengalami kemunduran akibat berbagai faktor. Melemahnya sektor ekonomi, kemunduran militer, pemerintahan yang tidak stabil sesudah masa Aurangzeb, serta penghabisan keuangan di golongan istana menjadi penyebab utama runtuhnya kekuasaan Mughal di India, yang kemudian diteruskan oleh Inggris (Zalukhu, 2024).

Mempelajari puncak kejayaan peradaban Islam di tengah mayoritas agama Hindu di India menjadi lebih sesuai dalam konteks dinamika politik dan sosial sekarang, di mana kefokusannya berbasis agama lebih memengaruhi standar sosial di beragam belahan dunia. Adanya mengetahui bagaimana Dinasti Mughal berhasil menerapkan model pemerintahan yang inklusif dan pluralis di tengah mayoritas Hindu, kita bisa memperoleh wawasan berharga untuk menumbuhkan penghormatan antaragama serta memecahkan persoalan pribadi di masyarakat modern.

Namun, masa keemasan Mughal menunjukkan bahwa kewenangan yang mengedepankan percakapan beberapa agama dan pengetahuan budaya dapat menjadi faktor utama dalam menciptakan kesenjangan serta stabilitas politik waktu lama. Jadi, penelitian ini bukan untuk berkontribusi pada pembahasan sejarah Islam di Asia Selatan, namun menawarkan perspektif mudah dalam menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam secara agama sekarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan khusus yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana Dinasti Mughal berhasil mencapai puncak peradaban Islam di India di tengah kebanyakan Hindu. Kedua, kewenangan dan cara apa yang diimplementasikan beberapa pemimpin Mughal untuk menciptakan hubungan nyaman antara Islam dan Hindu dan mengatur stabilitas politik di tengah ketidakpercayaan agama. Ketiga, bagaimana kewenangan pluralisme agama berkontribusi terhadap perkembangan peradaban Mughal, tentunya pada aspek seni, budaya, dan administrasi pemerintahan. Keempat, hal yang bisa dipetik dari ketercapaian Dinasti Mughal ketika mengatur beberapa macam agama untuk diterapkan dalam masyarakat pluralistik masa kini.



METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan mencari, mengetahui arti, pengalaman, dan kondisi sejarah yang berkaitan dengan Dinasti Mughal secara kritis. Pendekatan ini diambil sebab sesuai untuk menerapkan bidang lengkap peradaban Mughal, seperti dinamika sosial, politik, dan budaya yang tercipta dari hubungan antara Islam dan Hindu di India.

Metode ini kemungkinan analisis terhadap beragam narasi sejarah, kewenangan keagamaan, dan dampak peradaban Mughal terhadap masyarakat India. Pendekatan kualitatif lebih efektif dalam penelitian ini karena berfokus pada interpretasi kritis terhadap data, sehingga bisa memberikan pemahaman yang kritis mengenai penerapan kewenangan pluralisme agama oleh beberapa atasan Mughal serta pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan studi literatur dengan menelaah beragam rujukan, berupa primer dan sekunder. Sumber primer yang dimanfaatkan mencakup penulisan sejarah, dokumen administratif, dan manuskrip lama yang memuat kewenangan dan sistem pemerintahan Mughal. Namun, sumber sekunder terdiri dari beberapa buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema ini. Fokus dalam kajian literatur sejarah berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang sangat mendalam mengenai puncak kejayaan peradaban Islam di India dan bagaimana mayoritas agama Hindu memengaruhi dinamika pemerintahan dan kebudayaan di waktu tersebut (Dawis Dkk, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Dinasti Mughal dalam Mewujudkan Kejayaan Peradaban Islam di India

Dinasti Mughal mencapai kejayaan peradaban Islam di India walaupun terletak di bagian wilayah Hindu melalui kewenangan inklusif dan pemerintahan yang menghormati. Ketercapaian ini terutama didukung oleh pendekatan akomodasi yang diterapkan oleh beberapa prajurit Mughal, khususnya Akbar. Ia memberitahukan kewenangan *Sulh-i Kull* yang kemungkinan beragam golongan agama hidup berpasangan secara nyaman. Akbar menyadari bahwa stabilitas politik dan sosial hanya dapat dicapai dengan merangkul populasi Hindu yang dominan.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Akbar tidak hanya memberikan kesempatan bagi elit Hindu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan militer, tetapi juga menjalin hubungan pernikahan dengan anak bangsawan Hindu untuk meyambung ikatan dengan golongan mereka. Namun, ia menghilangkan pajak *jizyah* yang dilibatkan kepada orang kristen dan memperkenalkan konsep agama allah, sebuah pemikiran yang mempersatukan elemen dari beragam agama dengan tujuan memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Kebijakan toleransi ini dilanjutkan oleh generasi Akbar, seperti Jahangir dan Shah Jahan, walaupun dengan pendekatan yang tidak sama. Pada zaman Shah Jahan, Dinasti Mughal mencapai puncak keemasan dalam seni dan arsitektur, yang menciptakan campuran unsur Islam dan Hindu. Salah satu contoh terbaiknya adalah Taj Mahal, sebuah mahakarya yang mengintegrasikan elemen seni Persia, Islam, dan India. Selain arsitektur, Dinasti Mughal juga memberikan dukungan besar terhadap perkembangan seni, budaya, dan sastra yang menciptakan keberagaman budaya di India (Ali, 2015).



Ketercapaian Dinasti Mughal bukan hanya didasarkan dalam kewenangan politik dan sosial, namun dalam administrasi yang efektif serta aturan hukum yang bisa mempersatukan keberagaman suku dan agama di India. Sebab adanya otonomi lokal kepada beberapa penguasa Hindu di bagian khusus, Mughal berhasil menumbuhkan rasa kepunyaan di kalangan masyarakat setempat, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas kerajaan. Pendekatan inklusif dalam aspek sosial dan keagamaan ini menjadikan Dinasti Mughal sebuah peradaban Islam terbanyak di dunia, dengan pencapaian luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan pemerintahan yang sudah memiliki pengaruh dalam sejarah peradaban umum

Pendekatan dan Strategi dalam Membangun Keharmonisan antara Islam dan Hindu di India

Beberapa penguasa Mughal, khususnya Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan, mengimplementasikan berbagai kewenangan dan cara untuk menciptakan hubungan kerukunan antara Islam dan Hindu mengatur stabilitas politik di tengah ketidaksamaan agama di India. Sebuah kewenangan utama ialah konsep *Sulh-i Kull* yang diperkenalkan oleh Akbar. Kewenangan ini menekankan penghormatan beragama di semua bagian kerajaan, memungkinkan komunitas Hindu, Jain, Zoroaster, dan Kristen hidup berpasangan dengan aman

Sebagai langkah untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat Hindu yang mayoritas, Akbar menghilangkan pajak *jizyah* yang sebelumnya diharuskan bagi orang kristen, sehingga meningkatkan tunjangan dan loyalitas mereka terhadap pemerintahan Mughal. Ia juga menerapkan cara politik melalui pernikahan dengan anak bangsawan Hindu Rajput, yang tidak hanya mempererat aliansi dengan golongan Hindu, namun mempertahankan kemampuan pemberontakan dari kelompok Rajput yang mempunyai kekuatan militer sesuai.

Selain itu, kenaikan pejabat Hindu ke tempat strategis dalam pemerintahan menjadi salah satu strategi penting. Beberapa di antara mereka dinaikkan sebagai *mansabdars* dan diberikan tanggung jawab administratif di berbagai wilayah, menumbuhkan rasa kepunyaan terhadap kerajaan. Pendekatan inklusif tercermin pada budaya dan seni, di mana arsitektur Mughal memadukan unsur Hindu dan Islam, menumbuhkan ciri budaya yang khas. Salah satu contohnya adalah Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan, yang mempersatukan elemen arsitektur India dengan gaya Persia dan Islam, melambangkan perpaduan keindahan budaya.

Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bawah Dinasti Mughal belum setenar beberapa dinasti Islam sebelumnya, berbagai peninggalan sejarah menunjukkan bahwa kesenjangan di bidang ini tetap terjadi. Namun, faktor internal seperti lemahnya kepemimpinan setelah era kejayaan, perebutan kekuasaan di antara keturunan kerajaan, serta lemahnya kontrol pemerintahan berkontribusi terhadap kemunduran dinasti. Di sisi lain, faktor eksternal seperti meningkatnya pemberontakan di berbagai daerah dan ekspansi kolonial Inggris ke India turut mempercepat runtuhnya Dinasti Mughal (Riyadi, 2019).

Pendekatan ini terus meningkat di bawah kepemimpinan Jahangir dan Shah Jahan, walaupun dengan tingkat intensitas yang tidak sama. Jahangir, meskipun beragama Islam, terus mempertahankan kebijakan penghormatan beragama serta melibatkan beberapa bangsawan Hindu dalam birokrasi kerajaan. Dengan strategi ini, para penguasa Mughal mampu menumbuhkan stabilitas politik dan sosial yang cukup kuat, sebab mereka memahami perannya mempersatukan keberagaman agama sebagian dari sistem pemerintahan mereka. Beberapa kewenangan di bidang



politik, sosial, dan budaya ini memungkinkan Dinasti Mughal merawat kerukunan di tengah ketidaksamaan agama serta mempertahankan stabilitas yang menjadi fondasi utama keemasan mereka.

Dampak Kewenangan Pluralisme Agama terhadap Perkembangan Peradaban Mughal

Kewenangan pluralisme agama yang dijalankan oleh beberapa pemimpin Mughal memberikan pengaruh besar terhadap kesenjangan peradaban mereka, khususnya pada aspek seni, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Pada aspek seni, dampak pluralisme ini tampak jelas dalam arsitektur dan seni rupa. Karya monumental seperti Taj Mahal, Benteng Agra, dan Masjid Jama menumbuhkan beragam harmonis antara gaya arsitektur Islam, Persia, serta unsur-unsur Hindu, sehingga menghasilkan ciri budaya yang khas dan bermacam(Nurdiana, 2024).

Ornamen bangunan, penerapan motif bunga, kaligrafi, dan pola geometris ciri Islam berpadu dengan seni ukir batu tradisional India, menciptakan gaya arsitektur yang memukau dan khas. Namun, seni miniatur Mughal mengintegrasikan tradisi seni Persia dan India, dengan gambar yang mendeskripsikan keseharian di istana, pertempuran, serta aktivitas keseharian yang sarat dengan simbolisme bagian agama.

Dalam aspek budaya, kebijakan pluralisme agama Mughal turut berkontribusi pada perkembangan sastra dan musik. Pada masa pemerintahan Akbar, karya sastra di beragam bahasa seperti Persia, Hindi, dan Urdu berkembang pesat, memperoleh tulisan-tulisan yang menumbuhkan keberagaman budaya dalam kerajaan. Akbar juga mendukung perkembangan musik, di mana rupa musik tradisional India seperti Dhrupad dikembangkan lebih lanjut dengan peran dari tradisi musik Persia dan Islam. Kesenian ini menguatkan ciri budaya Mughal yang inklusif, menghormati berbagai tradisi seni yang terdapat di bagian kekuasaannya.

Pada pengelolaan pemerintahan, prinsip pluralisme agama Mughal tercipta pada sistem birokrasi yang terbuka dan berbasis pada kompetensi. Akbar, misalnya, menaikkan pejabat Hindu ke bagian jabatan penting, seperti mansabdar dan gubernur provinsi, yang bukan hanya meningkatkan stabilitas politik namun memperkuat efektivitas pemerintahan. Kewenangan ini menyebarkan dukungan sosial dan politik bagi dinasti Mughal, sebab beragam golongan agama diakui mempunyai peran dalam tata kelola negara. Melalui sistem mansabdari, pengaturan wilayah menjadi sangat aman dan terstruktur, dengan beberapa pemimpin lokal diberi wewenang administratif yang ada dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Jadi, kewenangan pluralisme agama bukan untuk mempertahankan legitimasi politik Mughal namun mendorong kejayaan di bidang seni, budaya, serta aturan pemerintahan yang teratur, menjadikan dinasti ini sebuah peradaban sangat terdepan dan inklusif pada waktunya.

Pelajaran dari Ketercapaian Dinasti Mughal dalam Mengatur Keberagaman Keagamaan

Ketercapaian Dinasti Mughal ketika mengatur keragaman agama memberikan wawasan terhormat bagi beberapa negara modern yang mempunyai masyarakat pluralistik. Sebuah hikmah khusus yang dapat diambil ialah pentingnya menghormati dan inklusivitas sebagai dasar kewenangan pemerintahan. Beberapa pemimpin Mughal, tentunya Akbar, mampu menumbuhkan stabilitas politik, sosial dengan menghormati dan mengakomodasi keberagaman agama, salah satunya golongan Hindu, sehingga semua kelompok memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan.



Di era modern, beberapa negara merasakan persoalan keberagaman etnis, agama, dan budaya, kewenangan semacam ini menunjukkan bahwa pendekatan yang inklusif dapat mengurangi ketegangan sosial serta mencegah diskriminasi terhadap golongan bawah. Jadi sangat sesuai bagi beberapa negara multikultural yang ingin membangun keharmonisan sosial dan mencegah konflik berbasis perbedaan identitas.

Selain itu, keberhasilan Mughal dalam membangun dialog antaragama melalui kebijakan "Sulh-i Kull" dan forum diskusi seperti "Ibadat Khana" menjadi contoh bagaimana komunikasi dan kolaborasi antaragama dapat menciptakan pemahaman serta kerja sama yang lebih erat. Pendekatan ini dapat diterapkan di dunia modern untuk mencegah radikalisme serta membangun fondasi yang kuat bagi kehidupan sosial yang damai.

Keberagaman juga dapat menjadi sumber kekuatan bagi suatu peradaban, bukan sekadar tantangan. Dinasti Mughal menyatakan bahwa pluralisme bisa mendukung perkembangan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks globalisasi sekarang, beberapa negara yang mampu mengatur keberagaman dengan baik bisa menggunakan kemampuan kreatif dan inovatif dari masyarakat multikultural mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, dan stabilitas politik.

Oleh karena itu, pengalaman Dinasti Mughal mengajarkan bahwa ketercapaian ketika mengatur keberagaman agama dan budaya membutuhkan komitmen terhadap penghormatan, keterbukaan, dan dialog. Beberapa negara modern bisa menjadikan model ini sebagai inspirasi dalam menumbuhkan masyarakat yang rukun, aman, dan nyaman (Lubis, 2021).

Menelusuri Para Pemimpin Dinasti Mughal

Berikut adalah para pemimpin Dinasti Mughal yang berkontribusi ketika mengembangkan serta memajukan dinasti tersebut:

1. Zahiruddin Muhammad Babur

Zahiruddin Muhammad Babur, pendiri Dinasti Mughal, merupakan keturunan Timur Lenk dari garis bapak dan Jenghiz Khan dari pihak ibu. Bapaknya, Umar Mirza, adalah penguasa Ferghana. Waktu kepemimpinan Babur menghadapi dua tantangan utama: kebangkitan beberapa kerajaan Hindu yang berupaya mengabaikan pribadi dari kekuasaan Islam dengan melakukan pemberontakan pada tahun 1526–1527 M, serta keberadaan penguasa Muslim di Afghanistan yang tetap setia kepada keluarga Lodi dan menolak pemerintahannya. Tetapi, Babur berhasil mengatasi kedua permasalahan tersebut dan memperkuat kekuasaannya.

2. Naseeruddin Humayun

Setelah Babur wafat, kepemimpinan Dinasti Mughal dilanjutkan oleh putra sulungnya, Naseeruddin Humayun, yang namanya memiliki makna "yang disukai oleh keberuntungan." Humayun dikenal sebagai sosok yang mencintai perdamaian dan memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Namun, ia sering kali kesulitan beradaptasi dengan situasi di sekitarnya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai raja yang dermawan, ramah, serta memiliki sifat pemaaf.



3. Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan

Waktu pemerintahan Akbar diakui sebagai zaman keemasan Dinasti Mughal, yang berkembang menjadi sebuah kekuatan Islam terbanyak di India. Akbar memiliki sifat pemberani, berkarakter tegas, serta gemar berperang, berburu, dan memanah. Sejak kecil, ia sangat tertarik pada berburu dibandingkan belajar, sehingga sepanjang hidupnya ia belum mahir dalam membaca dan menulis.

Walaupun, Akbar mewarisi kecintaan kakek dan bapaknya terhadap ilmu pengetahuan serta gemar mendengarkan para ulama dan cendekiawan. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan. Apabila naik tahta pada usia 14 tahun, pemerintahan awalnya dikelola oleh Bairam Khan, sahabat dekat bapaknya yang bermazhab Syiah.

Ketercapaian ekspansi militer Akbar mengukuhkan Dinasti Mughal sebagai kekuatan besar. Dua gerbang strategis India, yaitu kota Kabul yang mengarah ke Turkistan dan Kandahar yang menjadi akses ke Persia, berhasil diambil oleh pemerintahannya.

Selain itu, Akbar menerapkan kebijakan “Sulh-e-Kul” yang menegaskan bahwa seluruh rakyat memiliki kesetaraan tanpa dibedakan berdasarkan agama atau status sosial. Dalam bidang keagamaan, ia secara resmi memperkenalkan Din-i-Ilahi, sebuah cara yang menyatukan berbagai agama di India dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik antar pemeluk agama.

4. Jehangir

Masa pemerintahan Jehangir diwarnai oleh pemberontakan di Ambar yang gagal ditumpas. Selain itu, ancaman juga datang dari dalam istana, di mana putranya sendiri, Kurram, memberontak. Dengan dukungan panglima Muhabbat Khar, Kurram berhasil menangkap dan menahan Jehangir. Namun, adanya upaya permaisuri, konflik antara bapak dan anak ini bisa diselesaikan. Selama kekuasaannya, Jehangir berhasil menaklukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Upaya dalam menjaga stabilitas wilayah serta ekspansi yang dilakukannya menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kenegarawanan yang ia warisi dari sang ayah, Akbar.

5. Syah Jehan.

Syah Jihan naik takhta menggantikan Jehangir. Pada masa pemerintahannya, tanda-tanda perpecahan mulai muncul, menguji keberlangsungan politik toleransi yang dianut oleh Dinasti Mughal. Selama kepemimpinannya, terdapat beberapa kali pemberontakan besar. Di tahun awal pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela mencoba mengganggu keamanan, tetapi terwujud ditumpas, dan ia kemudian diusir. Pemberontakan terbesar masuk dari Afghan Pir Lodi, seorang gubernur di provinsi bagian selatan (Syukrillah, 2017).

6. Aurangzeb

Aurangzeb merupakan sultan terakhir yang besar dalam Dinasti Mughal, menjabat dari tahun 1658 hingga 1707 M. Ia dikenal dengan gelar Alamgir Padshah Ghazi. Sebagai pemimpin yang berani dan cerdas, Aurangzeb dianggap sejajar dengan Akbar dalam hal kebesaran pemerintahannya. Di akhir masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan wilayah Deccan, Bangla, dan Aud.



Namun, kebijakan yang diterapkan Aurangzeb berbeda dari para pendahulunya, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat Hindu. Ia mengubah banyak kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh beberapa raja Mughal sebelumnya, dengan pendekatan yang lebih ketat terhadap komunitas Hindu. Beberapa kebijakannya termasuk melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, serta pemanfaatan narkoba di tahun 1659 M. Di tahun 1664, ia juga mengeluarkan peraturan yang melarang pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan *sati daho*—tradisi pembakaran pribadi seorang janda—tanpa persetujuan mereka. Implementasinya kemudian dihapus secara resmi pada masa penjajahan Inggris.

Selain itu, Aurangzeb melarang pertunjukan musik di istana, menerapkan *poll-tax* (jizyah) bagi non-Muslim pada tahun 1668 M, memerintahkan penghancuran kuil-kuil Hindu, serta mendukung penyusunan kodifikasi aturan Islam yang disebut sebagai *Fatwa Alamgiri*.

7. Pemerintahan Pasca-Aurangzeb

Sesudah wafatnya Aurangzeb pada tahun 1707 M, Dinasti Mughal berada di bawah kepemimpinan beberapa sultan yang tidak kuat, yang gagal merawat keberlangsungan kekuasaan mereka. Di antara para penguasa tersebut adalah Bahadur Shah Alam, Jahandar Shah, Farrukhsiyar, Rafi ud-Darajat, Shah Jahan, Muhammad Shah, Ahmad Shah Bahadur, Alamgir II, Jahan III, Shah Alam II, Jahan Shah, dan Akbar Shah II. Dinasti Mughal akhirnya mencapai titik akhirnya di bawah pemerintahan raja terakhir, Bahadur Shah II, yang berkuasa dari tahun 1837 hingga 1858 M).

Memahami Penyebab Kemunduran Dinasti Mughal pada Zamannya

Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemunduran Dinasti Mughal hingga akhirnya runtuh pada tahun 1858 M, antara lain (Amin, 2016):

1. Kurangnya perkembangan dalam penguatan militer menyebabkan ketidakmampuan angkatan laut Mughal dalam mengawasi dan menghadapi operasi militer Inggris di wilayah pesisir.
2. Dekadensi moral serta gaya hidup megah di golongan atas politik menyebabkan penghabisan sumber daya negara.
3. Pendekatan Aurangzeb yang sangat keras ketika mengimplementasikan prinsip-prinsip puritan dan kecenderungan asketisnya menciptakan ketegangan antaragama yang sulit diatasi oleh para sultan setelahnya.
4. Para pewaris takhta pada periode akhir dinasti merupakan pemimpin yang lemah, sehingga tidak bisa mengendalikan kemunduran politik di dalam negeri.
5. Banyaknya pemberontakan sebab kurangnya kepemimpinan setelah masa Aurangzeb menyebabkan berbagai wilayah Mughal terlepas dari kendali kekaisaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, bisa dijelaskan bahwa ketercapaian Dinasti Mughal ketika mencapai puncak peradaban Islam di India, di tengah mayoritas agama Hindu, ialah wujud dari kewenangan pluralisme agama yang bersifat inklusif dan penghormatan. Strategi seperti "Sulh-i



Kull" yang mengedepankan perdamaian universal, pemberian posisi penting kepada pejabat Hindu dalam pemerintahan, serta penghapusan pajak jizyah mencerminkan bagaimana Mughal berhasil menciptakan harmoni beberapa agama.

Kewenangan ini bukan hanya merawat stabilitas politik dan sosial, namun memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan seni, budaya, dan sistem pemerintahan Mughal. Campuran unsur Hindu dan Islam pada arsitektur, kesenjangan dalam bidang musik dan sastra yang menumbuhkan keberagaman, dan birokrasi yang inklusif menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi keunggulan dan landasan inovasi.

Hikmah dari ketercapaian Dinasti Mughal tetap sesuai dalam arti masyarakat modern, khususnya di beberapa negara dengan keberagaman agama dan budaya. Penghormatan, inklusivitas, serta percakapan beberapa agama menjadi landasan penting ketika menumbuhkan kehidupan yang harmonis dan stabilitas politik. Beberapa negara saat ini bisa menerapkan kewenangan yang menghargai perbedaan dan mendukung kontribusi aktif keseluruhan golongan agama dan suku di pemerintahan, sekaligus membangun ruang untuk percakapan yang konstruktif.

Keberagaman harus dikelola dengan baik, dihargai sebagai kekuatan yang dapat mendukung keemasan sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi, pengalaman Dinasti Mughal memberikan pengetahuan tertinggi mengenai bagaimana mengelola keberagaman secara bijaksana demi menumbuhkan masyarakat yang damai dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Nasihudin. "Kepemimpinan Shah Jahan Di Kesultanan Mughal." *Juspi* I, no. 1 (2015): 154–92.
- Amin, Muhammad. "Serta Dampaknya Terhadap Dunia Islam," 2016.
- Darmawan, Fery, Haidar Putra Daulay, and Solihah Titin Sumanti. "TOFEDU : The Future of Education Journal A Study on Islamic Culture during the Mughal Era in India" 3, no. 5 (2024): 1940–47.
- Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januarsari, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.
- Lubis, Dede Efrianti, Ahmad Muhajir, and Zaini Dahlan. "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal Di India." *Islamic Education* 1, no. 2 (2021): 41–46. <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.49>.
- Nurdiana, Siti, and Amril M. "Sulakhul Politics as a Result of Sultan Akbar's Reformist and Revolutionary Thought Amidst Hindu Domination in India." *Nizham Journal of Islamic Studies* 12, no. 01 (2024): 43–60. <https://doi.org/10.32332/nizham.v12i01.8643>.
- Riyadi, A. S. I. M. (2019). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pada Masa Dinasti Mughal. *Jurnal Al-Mujaddid* ISSN, 2476, 8855.
- Syukrillah, Muhammad. "Dinasti Mughal." *Academia Edu*, 2017, 156. https://books.google.co.id/books?id=MIU_DwAAQBAJ&dq=kerajaan+mughal+di+india&hl=id&source=gbs_navlinks_s.
- Zalukhu, Derita Murni, and Hasil Pembahasan. "Tahun 1525-1857 M" 3 (2024): 125–34.